

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinperinaker Kota Pekalongan sejatinya tidak ditemukan peran yang dilaksanakan secara signifikan. Peran yang dilaksanakan oleh Dinperinaker hanya sebatas teknis yang sebenarnya sudah merupakan tugas pokok Dinperinaker. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat hanya menginginkan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mendukung implementasi Program Kartu Prakerja, Dinperinaker telah berhasil melaksanakan empat peran dari enam peran yang diamanahkan dalam Perpres No. 36 Tahun 2020. Peran yang berhasil dilaksanakan yaitu sosialisasi pelaksanaan program, penyediaan data kebutuhan tenaga kerja, fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan, dan pendampingan. Namun, pelaksanaan peran hanya sebatas pada yang tercantum dalam perpres tanpa adanya petunjuk teknis dan hubungan fungsional dengan Manajemen Pelaksana. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi mengenai bentuk peran yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinperinaker, sejatinya disebabkan oleh besarnya peran Manajemen Pelaksana dan minimnya peran Dinperinaker dalam pelaksanaan operasional Program Kartu Prakerja. Manajemen Pelaksana memiliki peran yang besar yaitu terlibat dalam semua

proses seleksi peserta dan LPK, sedangkan peran Dinperinaker hanya menjalankan perintah atau tugas dari pusat. Hal ini menghambat pelaksanaan peran penyediaan data LPK di daerah dan sistem berbagi biaya karena seluruhnya telah dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana. Dalam hal ini, terlihat bahwa tidak adanya kerja sama atau kolaborasi yang baik antara Dinperinaker dan Manajemen Pelaksana.

#### **4.2. Saran**

Saran yang dapat disampaikan yaitu:

- a. Pemerintah Pusat seharusnya membangun ekosistem yang kolaboratif antara Manajemen Pelaksana dengan Dinperinaker. Kolaborasi dilakukan dengan pembagian peran sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan pelaksana, sehingga Program Kartu Prakerja dapat berjalan dengan optimal. Dalam hal ini, seharusnya Dinperinaker dilibatkan dalam proses seleksi peserta dan Lembaga Pelatihan daerah, karena Dinperinaker dinilai lebih mengetahui karakteristik dan kebutuhan warganya.
- b. Fungsi anggaran yang begitu penting bagi sebuah kebijakan atau program seharusnya tidak diabaikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah seharusnya menganggarkan sejumlah dana agar peran Dinperinaker dalam mendukung Program Kartu Prakerja dapat terlaksana dengan baik.
- c. Berkaitan dengan fasilitasi, Dinperinaker sebaiknya menyediakan SDM khusus untuk melayani pendaftaran Program Kartu Prakerja. Kemudian juga

diperlukan perbaikan pada jaringan WIFI serta penambahan Komputer atau PC agar memudahkan masyarakat yang ingin mendaftar Program Kartu Prakerja.